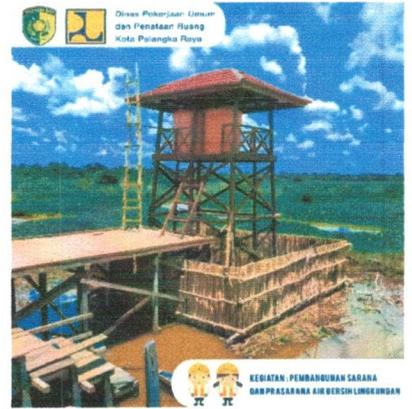
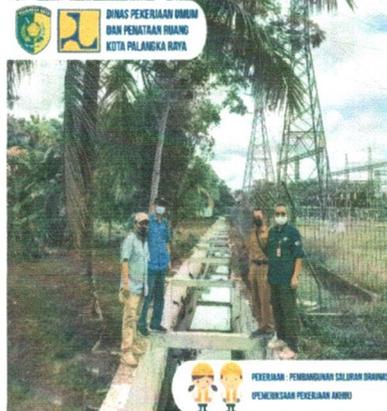
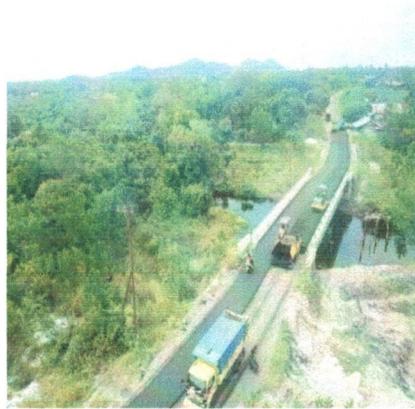
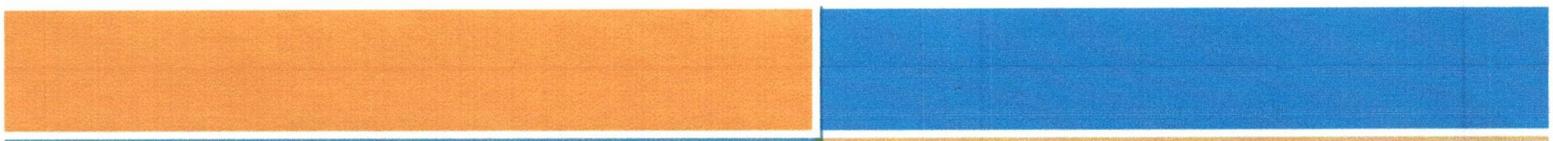




# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dan sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Akhirnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Palangka Raya, 15 Januari 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kota Palangka Raya



**ARBERT TOMBAK, S.E.,M.A.P.**

Pembina Utama Muda

NIP. 11671209 199703 1 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/Badan Hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Seluruh program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Untuk mengukur nilai akhir dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kota Palangka Raya Tahun 2020 dapat dilihat pada :

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kinerja Tahunan
3. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pencapaian kinerja pada Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta hasil dari pembangunan ini telah dapat dirasakan oleh masyarakat. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk dijadikan tolok ukur dalam peningkatan kinerja di masa mendatang.

Palangka Raya, 15 Januari 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kota Palangka Raya



**ARBERT TOMBAK, S.E.,M.A.P.**

Rebrena Utama Muda

NIP. 11671209 199703 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>Bab I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Isu Strategis .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>Bab II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>10</b>
A. Perencanaan Strategis.....	10
1. Visi .....	10
2. Misi .....	10
3. Tujuan dan Sasaran .....	10
4. Strategi dan Arah Kebijakan .....	11
5. Rencana Aksi .....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	16
<b>Bab III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>18</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .....	18
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	19
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	20
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada) .....	20
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	21
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	21
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	23
B. Realisasi Anggaran .....	28
<b>Bab IV PENUTUP</b> .....	<b>32</b>

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## DAFTAR TABEL

Tabel	1.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan .....	4
Tabel	1.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	4
Tabel	1.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Eselon dan Fungsional .....	5
Tabel	1.4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang .....	6
Tabel	1.5.	Aset Yang Dikelola Dinas PUPR Kota Palangka Raya .....	7
Tabel	1.6.	Jumlah APBD Perubahan Yang Dikelola Dinas PUPR .....	8
Tabel	2.1.	Tujuan dan Sasaran .....	11
Tabel	2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	12
Tabel	2.3.	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	13
Tabel	2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	16
Tabel	2.5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 .....	17
Tabel	3.1.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 .....	18
Tabel	3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya .....	19
Tabel	3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah ..	20
Tabel	3.4.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020 .....	22
Tabel	3.5.	Analisis Kebutuhan Sumber Daya .....	22
Tabel	3.6.	Analisis SWOT .....	25
Tabel	3.7.	Capaian Program Prioritas Tahun 2020 .....	26
Tabel	3.8.	Realisasi Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2020 .....	28
Tabel	3.9.	Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020 .....	29
Tabel	3.10.	Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 .....	30

# BAB I PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Guna mewujudkan kinerja pelayanan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai suatu bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Palangka Raya memiliki tugas dan fungsi yang tidak terlepas dari kewenangan-kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

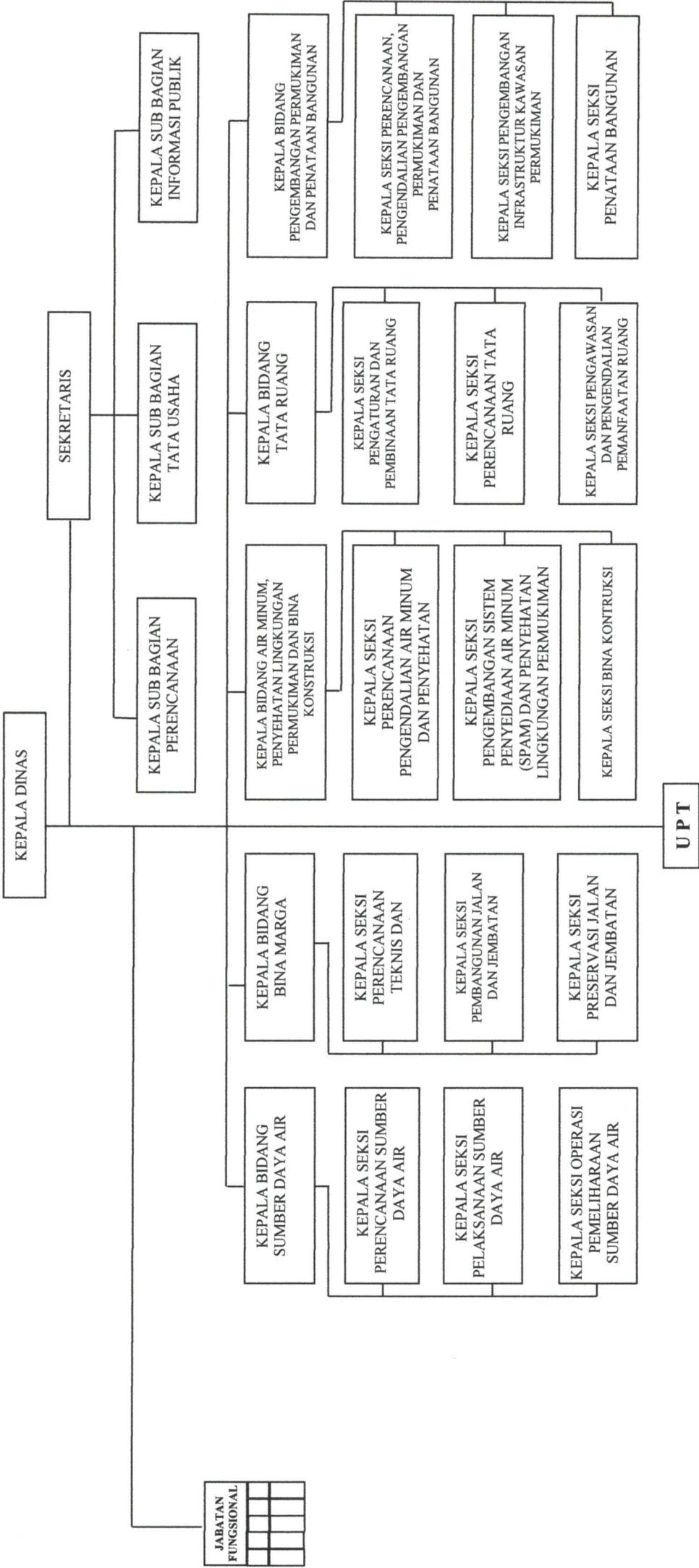
## B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 38 Tahun 2019 ditetapkan dengan Tipe A, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas, membawahkan :
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kepala Sub Bagian Informasi Publik.
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
  - a. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
  - b. Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
  - c. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
4. Kepala Bidang Bina Marga, membawahkan :
  - a. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
  - b. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

- c. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- 5. Kepala Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi, membawahkan :
  - a. Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);
  - b. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP); dan
  - c. Kepala Seksi Bina Konstruksi.
- 6. Kepala Bidang Tata Ruang, membawahkan :
  - a. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
  - b. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
  - c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 7. Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan, membawahkan :
  - a. Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan;
  - b. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman; dan
  - c. Kepala Seksi Penataan Bangunan.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 9. Kelompok Jabatan Pelaksana

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA



Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sampai akhir Tahun 2020 didukung Sumber Daya Manusia sebanyak adalah sebanyak 64 orang yang dapat dikelompokkan menurut tingkat pendidikan; jenis kelamin; pejabat eselon dan fungsional; pangkat dan golongan ruang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

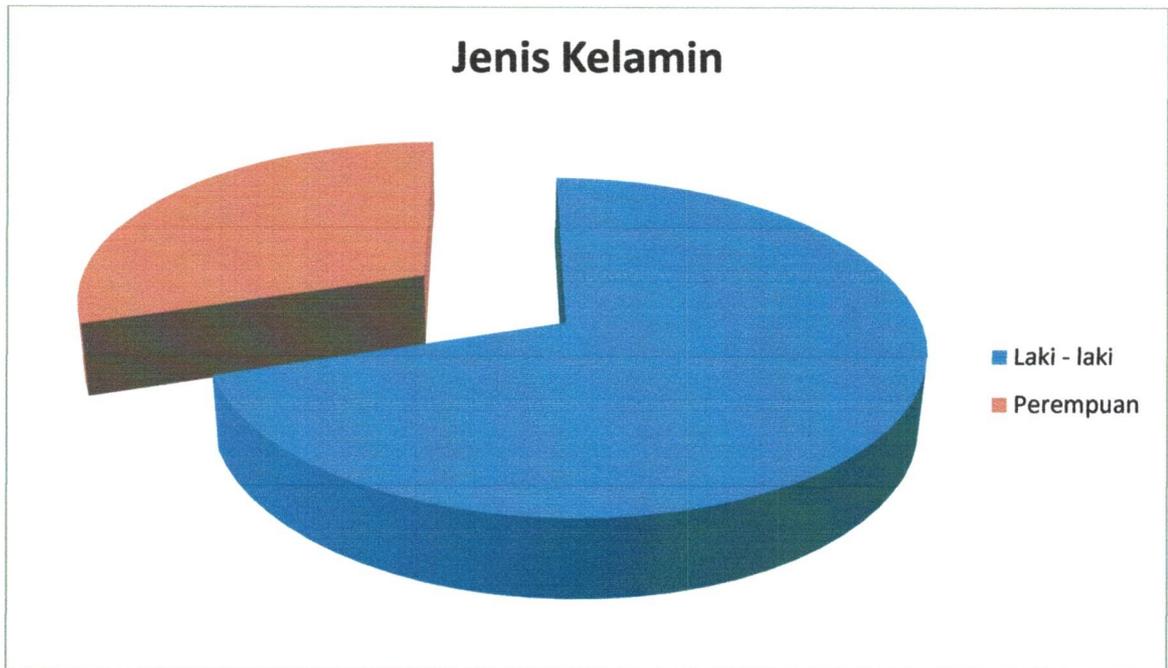
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA/D-2	-	3	4	-	7
4	D-3	-	-	5	-	5
5	S-1	-	-	42	2	44
6	S-2	-	-	2	6	8
7	S-3	-	-	-	-	-
Total						64



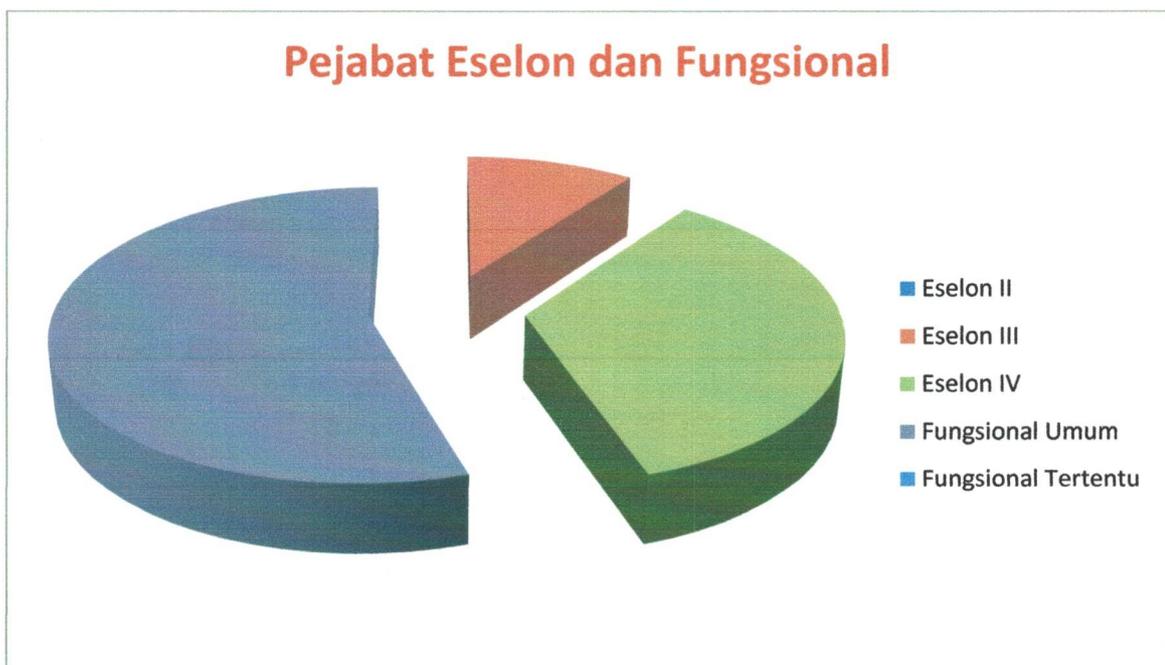
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
1	Laki - laki	46
2	Perempuan	18
<b>Total</b>		<b>64</b>



Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Eselon dan Fungsional

Eselon / Pelaksana	Golongan								Jumlah
	SD	SMP	SMA	D - 3	D - 4	S - 1	S - 2	S - 3	
1 Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2 Eselon III	-	-	-	-	-	3	3	-	6
3 Eselon IV	-	-	-	-	1	15	2	-	18
4 Fungsional Umum	-	-	7	5	1	24	2	-	39
5 Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	-	<b>64</b>



Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Pangkat	Golongan	Jumlah
II	c	-
	d	3
III	a	5
	b	7
	c	22
	d	19
IV	a	6
	b	1
	c	1
<b>Total</b>		<b>64</b>



Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sampai akhir Tahun 2019 berdasarkan Buku Induk Inventaris dalam pelayanan masyarakat berupa kantor, kendaraan dinas/kendaraan operasional dan perlengkapan kantor dengan rincian aset, yang terlihat pada Tabel 1.2. Sisanya adalah aset tanah dan infrastruktur yang merupakan infrastruktur publik.

Tabel 1.5. Aset Yang Dikelola Dinas PUPR Kota Palangka Raya

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Gedung kantor	2
2	Gedung aboratorium/Gudang alat	1
3	Kendaraan dinas/kendaraan operasional roda 4	10
4	Kendaraan dinas roda 2	2
5	Alat berat	16
6	Meja	94
7	Kursi	401
8	Lemari	91
9	A C	52
10	Brankas	3
11	LCD Proyektor	5
12	Sound System	1
13	Komputer	41
14	Laptop	39
15	Printer	76
16	UPS	34
17	Mesin tik	10
18	Kamera	17
19	Mesin potong rumput	2
20	Handy Talky	6
21	G P S	11
22	Theodolite	3
23	Alat ukur laser distancemeter	3
24	Penghancur kertas	4
25	Genset	1
26	Drone	2
27	Meteran dorong	1
28	Kompas	1
29	Apar	16
30	Echo Sounder	1
31	Rumah genset	1
32	Rumah jaga	1
33	Scanner	2
34	Mesin absensi	1
35	CCTV	1
36	Laci	28

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp. 104.659.617.445,07.

TABEL 1.6.  
JUMLAH APBD PERUBAHAN YANG DIKELOLA DINAS PUPR

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>350.000.000</b>
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>350.000.000</b>
4.1.2	Hasil Restribusi Daerah	350.000.000
5	<b>BELANJA</b>	<b>110.965.203.933,55</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22.213.114.833,55</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	9.113.686.614,48
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.099.428.219,07
5.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>88.752.089.100</b>
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	404.619.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.362.900.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.984.570.100
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0

### C. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis ini merupakan tantangan yang harus dijawab untuk terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua, dimana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyangkut masalah infrastruktur dan penataan ruang. Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian, diantaranya adalah :

1. Banyaknya ruas jalan kota yang kondisinya rusak/rusak berat dan tidak meratanya pembangunan infrastruktur jalan/jembatan pada semua kecamatan
2. Buruknya sistem drainase perkotaan
3. Penanganan infrastruktur tidak terfokus hingga tuntas.
4. Perbaikan manajemen tata ruang

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

###### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

###### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

##### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu